

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI
SENIN, 30 JANUARI 2012

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: --
Hari/Tanggal	: Senin, 30 Januari 2012
Pukul	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: - Progres Pelaksanaan e-KTP; - Pemilihan Kepala Daerah; dan - Masalah aktual lainnya
Kehadiran	: 36 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 12 orang izin

HADIR :

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si	Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA
Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si	Dra. Eddy Mihati, M.Si
Drs. Ramadhan Pohan, MIS	Alexander Litaay
H. Abdul Wahab Dalimunte, SH	Zainun Ahmadi
Ignatius Mulyono	H.M Gamari Sutrisno
Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd	KH. Aus Hidayat Nur
Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc	Agus Purnomo, S.IP
Rusminiati, SH	H. Rahman Amin
Paula Sinjal, SH, M.Si	Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM	H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
Nurul Arifin S.IP.,M.Si	Drs. H. Fauzan Syaich
Ir. Markus Nari, M.Si	Drs. H. Nuqman Abdul Hakim
Drs. Taufiq Hidayat, M.Si	Dr. AW. Thalib, M.Si
Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd	Abdul Malik Haramain, M.Si
Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si	Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
Arif Wibowo	Mestariyany Habie, SH
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH	Drs. Akbar Faizal, M.Si
Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill	Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

IZIN :

Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA	Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM
Ganjar Pranowo	Ir. Bambang Sutrisno
Drs. H. Djufri	Drs. Soewarno
Drs. H. Abdul Gafar Patappe	H. Yan Herizal, SE
Gede Pasek Suardika, SH.,MH	Drs. H. Akhmad Muqowam
Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum	Dra. Hj. Ida Fauziyah

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si /F-PG dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Perkembangan pelaksanaan program-program Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik (e-KTP) yakni
 - a. Tahun 2010, telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan di semua Kabupaten/Kota dan Penerbitan NIK di 330 Kabupaten/Kota;
 - b. Tahun 2011, telah dilaksanakan Penerbitan NIK di 167 Kabupaten/Kota, sehingga pemberian dan penerbitan NIK secara massal telah selesai dan Penerapan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota.
 - c. Tahun 2012, akan dilaksanakan Penerapan e-KTP di 497 Kabupaten/Kota, yakni penyelesaian pelaksanaan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota dan pelaksanaan penerapan e-KTP di 300 Kabupaten/Kota.
2. Progres pelaksanaan e-KTP Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - a. Pemasangan jaringan komunikasi data, yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni pemasangan untuk di DKI Jakarta (telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 2011) dan untuk di luar DKI Jakarta (yang telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2011).
 - b. Pemasangan Perangkat e-KTP, yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni untuk DKI Jakarta (telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus 2011) dan untuk di luar DKI Jakarta (telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2011).
 - c. Pelaksanaan Pelayanan e-KTP, yakni Untuk Provinsi DKI Jakarta, dimulai dari tanggal 8 Agustus 2011 dan di luar Provinsi DKI Jakarta, dimulai pada minggu ke-IV Agustus 2011.
 - d. Hasil pelayanan e-KTP Tahun 2011 sejumlah 42.285.937 atau 63,10% dari target 67.015.400 penduduk wajib KTP, dengan rincian Provinsi DKI Jakarta sejumlah 5.522.574 atau 87% dari target 6.372.951 penduduk wajib KTP, dan di luar Provinsi DKI Jakarta sejumlah 36.763.363 atau 61% dari target 60.642.449 penduduk wajib KTP.
3. Beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan e-KTP Tahun 2011 adalah Lamanya proses pelelangan sampai dengan penandatanganan kontrak, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh Konsorsium dalam penyelesaian pengadaan barang.
 - a. Untuk kelancaran pelaksanaan e-KTP Tahun 2012 Konsorsium melakukan langkah antisipatif yakni telah melakukan pemesanan perangkat e-KTP dan jaringan komunikasi data pada akhir Tahun 2011, akan menyediakan tenaga teknis di setiap ibukota Provinsi yang mampu melakukan perbaikan kerusakan alat di tempat pelayanan, akan menyediakan tenaga teknis di setiap ibukota Provinsi yang mampu melakukan perbaikan kerusakan alat di tempat pelayanan, akan menyediakan stock peralatan di setiap ibukota Provinsi untuk mengantisipasi penggantian alat yang rusak berat atau akibat terkena bencana.

- b. Untuk mengantisipasi penyelesaian sisa pekerjaan di 197 Kabupaten/Kota, Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan untuk anggaran pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan di 197 Kabupaten/Kota melalui APBN-P Tahun Anggaran 2012 (mengharapkan dukungan dan persetujuan Komisi II DPR-RI dalam rangka mewujudkan pencapaian target e-KTP pada akhir Tahun 2012).
4. Terkait dengan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2011
 - a. Pada Tahun 2011, telah dilaksanakan Pilkada di 87 Daerah, yang meliputi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di 5 Provinsi, yakni: Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Barat, Banten, dan Gorontalo. Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di 71 Kabupaten, serta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di 11 Kota.
 - b. Perkembangan pelaksanaan Pilkada Tahun 2011 di 87 Daerah, juga terdapat kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dilantik dan ada yang telah mendapat pengesahan namun belum dilantik, juga ada daerah yang sudah melaksanakan Pilkada, namun belum mengusulkan pengesahannya. Selain itu juga ada daerah yang hasil pilkadanya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (terregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan posisi dikabulkan, ditolak, tidak diterima, ditarik kembali, dan masih dalam proses). Dan ada daerah yang telah melaksanakan Pilkada pada Tahun 2011, namun belum dapat ditetapkan pemenang Pilkada.
 - c. Adapun Daerah Yang Masih Bermasalah Dalam Pilkada Tahun 2011 yakni Pilkada Kabupaten Pati, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua.
5. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2012 direncanakan sebanyak 73 Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 6 Provinsi;
 - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 50 Kabupaten;
 - c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 17 Kota.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan dan mempercepat penyelesaian program e-KTP di seluruh Kabupaten/Kota sesuai target selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2012; termasuk penyelesaian e-KTP target Tahun 2011 yang akan selesai pada 30 April 2012 untuk selanjutnya menyampaikan laporan perkembangannya 2 (dua) bulan sekali kepada Komisi II DPR RI.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendesak, menegur dan memberi sanksi apabila pihak Konsorsium tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati.

3. Terhadap penyelenggaraan Pemilukada diberbagai daerah sepanjang Tahun 2011 dan yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun 2012, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun berbagai langkah-langkah taktis dan strategis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dan dimungkinkan terjadi dalam Pemilukada. Jika dipandang perlu Komisi II DPR RI dan Pemerintah mengadakan kunjungan spesifik secara bersama-sama ke lokasi-lokasi penyelenggara Pemilukada. Untuk selanjutnya Kemendagri menyampaikan data dan informasi yang dimaksud kepada Komisi II DPR RI.

Rapat ditutup Pukul 13.25 WIB.

**JAKARTA, 30 JANUARI 2012
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

**DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.SI
A-219**